PENGAKUAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Ita Rahmi, Isnawati, Ekawati

*Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,
E-mail : ita_rahmi72@gmail.com*

ABSTRAK.

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam keluarga yang tidak dapat memiliki anak secara biologis. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pengangkatan anak menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya dalam hal kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengakuan hukum terhadap anak angkat sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa anak angkat memiliki kedudukan hukum yang sah setelah adanya penetapan pengadilan dan dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal hak waris, baik berdasarkan KUH Perdata maupun undang-undang terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait pengakuan sosial dan praktik pewarisan yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penegakan hukum yang konsisten agar hak-hak anak angkat sebagai ahli waris dapat terjamin secara adil.

Kata kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Hukum Perdata, Pengangkatan Anak, Ahli Waris.

RECOGNITION OF ADOPTED CHILDREN AS HEIRS ACCORDING TO CIVIL LAW IN INDONESIA

ABSTRACT.

Child adoption is a form of protection and fulfillment of the rights of children in families who cannot have biological children. In the context of civil law in Indonesia, adoption of children has various legal implications, especially in terms of the position of adopted children as heirs. This paper aims to examine how the legal recognition of adopted children as heirs according to the provisions of the applicable civil law in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and literature study. The results of the study show that adopted children have a legal status after a court determination and can be equated with biological children in terms of inheritance rights, both based on the Civil Code and related laws such as the Child Protection Law and Government Regulation Number 54 of 2007. However, its implementation still faces obstacles, especially related to social recognition and inheritance practices that are not always in accordance with legal provisions. Therefore, consistent socialization and law enforcement are needed so that the rights of adopted children as heirs can be guaranteed fairly.

Keywords: Adopted Children, Inheritance Rights, Civil Law, Adoption Of Children, Heirs.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata "nikah" yang secara harfiah berarti bersatu. Dalam konteks hukum, perkawinan didefinisikan sebagai suatu kontrak antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada hukum serta bertujuan mengatur hubungan prokreasi secara sesuai dengan norma agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Pernikahan menjadi hubungan sah antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual saling melengkapi sehingga mereka mengetahui tugas masing-masing.¹

Pernikahan juga dapat diartikan sebagai upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. Variasi pelaksanaannya berbeda-beda berdasarkan suku bangsa, agama, budaya, dan kelas sosial. Upacara ini biasanya juga merupakan momentum untuk dirayakan bersama teman dan keluarga. Setelah upacara selesai, pria dan wanita yang menikah disebut suami dan istri dalam ikatan perkawinan.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³ Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota lainnya yang tinggal bersama dalam satu atap serta saling bergantung.

Keluarga juga merupakan kelompok orang yang terikat karena perkawinan, kelahiran, atau adopsi, dan bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya serta perkembangan fisik, mental, dan sosial anggotanya. Dalam keluarga, seorang perempuan bisa memegang berbagai peran seperti istri, ibu, atau menantu, masing-masing dengan tanggung jawab dan harapan yang berbeda. Struktur keluarga dan hubungan antar anggotanya akan membentuk kekuatan dan dinamika peran yang ada.

Sebagai komunitas terkecil, keluarga sangat penting dalam menjamin hak dan kesejahteraan anak. Anak sebagai makhluk sosial dan ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup, kebebasan, serta perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, baik sejak dalam kandungan maupun setelah lahir.⁴ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan. Hak anak termasuk dalam kategori Hak Asasi Manusia yang harus diakui dan dijamin oleh hukum nasional dan internasional.

Namun, tidak semua keluarga dianugerahi anak kandung, sehingga pengangkatan anak menjadi solusi. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan adat serta ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan secara sah melalui putusan pengadilan ke dalam keluarga orang tua angkatnya.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa pengangkatan anak harus melalui keputusan pengadilan agar anak memperoleh kepastian hukum sebagai anggota keluarga yang sah.⁶ Dalam praktiknya, hak-hak anak angkat di berbagai daerah sering kali tidak diakui secara setara dengan anak kandung, terutama dalam hal warisan, meskipun menurut hukum anak angkat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung, termasuk hak waris.

Menurut KUH Perdata dan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, anak angkat yang sah disamakan dengan anak sah dari perkawinan orang tua angkat.⁷ Dalam pembagian warisan, anak angkat masuk dalam golongan ahli waris I, sama seperti anak kandung. Ahli waris dalam KUH Perdata dibagi menjadi dua, yakni ahli waris menurut undang-undang (ab intestato) dan ahli waris berdasarkan wasiat (testament). Oleh karena itu, penting untuk memahami pengakuan hukum terhadap anak angkat,

khususnya dalam konteks kewarisan, sehingga penulis tertarik mengkaji topik **“Tinjauan Hukum Terhadap Pengakuan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Perdata di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengakuan anak angkat menurut hukum di indonesia ?
2. Bagaimana pembagian hak waris kepada anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum perdata di indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hokum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan membahas pembagian hak warisan kepada anak angkat sebagai ahli waris menurut KUH Perdata kedudukan anak angkat dari sudut pandang hukum menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan membahas pembagian hak warisan kepada anak angkat sebagai ahli waris menurut KUH Perdata kedudukan anak angkat dari sudut pandang hukum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997

Dan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hokum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi isebagai pendukung, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Belanda-Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pengakuan Anak Angkat Menurut Hukum Di Indonesia.

Pengangkatan anak adalah salah satu fenomena yang telah lama terjadi di Indonesia, baik dalam konteks adat, agama, maupun hukum positif. Dalam masyarakat Indonesia, pengangkatan anak sering dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak yang diangkat atau untuk melanjutkan garis keturunan keluarga yang tidak memiliki anak kandung. Pengangkatan anak juga memiliki dampak hukum, khususnya dalam kaitannya dengan hak waris. Dalam hukum perdata di Indonesia, pengangkatan anak menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, termasuk dalam hal pengakuan dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.² Penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana

pengakuan anak angkat menurut hukum di Indonesia, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta praktik yuridis yang ada.

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Dalam konteks hukum positif, pengangkatan anak diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) bagi masyarakat yang tunduk pada sistem hukum perdata barat.

1. Pengaturan Anak Angkat dalam KUHPperdata

Menurut KUHPperdata, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 214. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum bagi proses pengangkatan anak, termasuk persyaratan dan akibat hukum yang timbul dari pengangkatan tersebut. Dalam sistem hukum perdata, pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, yang melibatkan persetujuan dari orang tua kandung, pihak yang akan mengangkat anak, serta persetujuan dari pengadilan. Proses ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang diangkat serta

² Afandi, Ali. 2000. "Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian Menurut Kitab

Undang-undang Hukum Perdata". Bina Aksara. Jakarta.hlm.45

memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Pengangkatan anak menurut KUHPerdota memiliki beberapa implikasi hukum, termasuk perubahan status hukum anak yang diangkat. Anak angkat berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak kandung dalam keluarga yang mengangkatnya, meskipun tidak secara otomatis memiliki kedudukan yang sama dalam hal warisan. Dalam hal ini, pengakuan anak angkat sebagai ahli waris harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam hukum perdata.

2. Pengaturan Anak Angkat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif terkait dengan pengangkatan anak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa pengangkatan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak angkat, termasuk hak untuk mendapatkan identitas hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang setara dalam keluarga yang mengangkatnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa pengangkatan anak harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan

pengadilan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, termasuk dalam hal pengakuan sebagai ahli waris. Dengan adanya penetapan pengadilan, status hukum anak angkat menjadi jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat.

3. Pengaturan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*. Namun, hukum Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan waris hanya berlaku antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris menurut hukum Islam.

Meskipun demikian, hukum Islam memberikan solusi untuk memberikan hak kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat.³ Orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui hibah selama mereka masih hidup atau melalui wasiat yang tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Dengan demikian, meskipun anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, hak-haknya tetap dapat dilindungi melalui mekanisme lain yang sesuai dengan hukum Islam.

Pengangkatan anak di Indonesia harus melalui prosedur hukum yang ketat untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi

³ Basyir Ahmad, Azhar., 1995. "Hukum Waris Islam". UII Press. Yogyakarta. Hlm.36

prioritas utama. Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk:

1. Persetujuan Orang Tua Kandung: Pengangkatan anak harus mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung, kecuali jika orang tua kandung telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.
2. Pemeriksaan oleh Dinas Sosial: Sebelum pengangkatan anak disahkan, dinas sosial akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak angkat.
3. Penetapan Pengadilan: Pengangkatan anak harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang sah bagi status anak angkat.

Proses ini dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengangkatan anak.

B. Pembagian Hak Waris Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Di Indonesia.

Sistem hukum waris di Indonesia pada dasarnya terbagi ke dalam tiga sistem, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁴ Meskipun demikian, persoalan mengenai hak waris anak angkat merupakan salah satu isu hukum yang kerap menimbulkan konflik

karena tidak ada pengaturan yang seragam antara ketiga sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum perdata, anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris seperti anak kandung. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum tertentu untuk mengakui kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif bagaimana pembagian hak waris kepada anak angkat diatur dalam hukum perdata di Indonesia, termasuk implikasi hukum dan tantangan yang dihadapi.

1. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Perdata

Hukum perdata di Indonesia mengatur bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak didasarkan pada hubungan darah. Oleh karena itu, anak angkat tidak secara otomatis masuk ke dalam golongan ahli waris menurut KUHPerdata. Anak angkat hanya dapat menerima warisan melalui dua mekanisme utama, yaitu wasiat (*testamentaire beschikking*) dan hibah (*schenking*).

Pasal 209 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang dapat mewariskan harta kepada pihak lain melalui wasiat, termasuk kepada anak angkat. Dalam hal ini, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris harus diakui melalui dokumen hukum yang sah, seperti akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Selain itu, anak angkat juga dapat menerima bagian warisan melalui hibah yang

⁴ Satrio, J. 2002. *Hukum Waris*. Penerbit Alumni, Bandung.hlm.43

diberikan oleh orang tua angkat selama mereka masih hidup.

Namun, terdapat batasan hukum mengenai besaran warisan yang dapat diberikan kepada anak angkat. KUHPerdara mengatur bahwa pemberian harta melalui wasiat atau hibah tidak boleh melampaui bagian mutlak (*legitieme portie*) yang menjadi hak ahli waris sah lainnya, seperti anak kandung atau pasangan sah. Hal ini berarti anak angkat hanya dapat menerima bagian warisan setelah hak-hak ahli waris mutlak terpenuhi.

2. Proses Pembagian Hak Waris kepada Anak Angkat

Dalam praktiknya, pembagian hak waris kepada anak angkat memerlukan beberapa tahapan hukum yang harus dipenuhi. Tahap pertama adalah pengakuan formal terhadap status anak angkat melalui penetapan pengadilan. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Tanpa adanya penetapan ini, anak angkat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak waris.

Tahap kedua adalah pembuatan dokumen wasiat atau hibah oleh orang tua angkat. Dalam hal ini, dokumen tersebut harus dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum perdata, seperti dilakukan di hadapan notaris dan disahkan oleh pengadilan. Dokumen ini menjadi dasar bagi anak angkat untuk menerima warisan setelah orang tua angkat meninggal dunia.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan isi wasiat atau hibah yang telah dibuat. Jika terjadi sengketa mengenai pembagian warisan, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

3. Tantangan dalam Pembagian Hak Waris kepada Anak Angkat

Meskipun telah diatur dalam KUHPerdara, pembagian hak waris kepada anak angkat kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun sosial. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuat dokumen wasiat atau hibah untuk melindungi hak-hak anak angkat. Banyak orang tua angkat yang tidak menyadari bahwa tanpa dokumen tersebut, anak angkat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut warisan.

Tantangan lainnya adalah perbedaan pandangan antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Dalam hukum adat dan hukum Islam, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, sehingga sering kali terjadi konflik antara keluarga angkat dan anak angkat dalam hal pembagian warisan. Selain itu, minimnya harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan anak angkat.

4. Upaya Penyelesaian Konflik Hak Waris Anak Angkat

Untuk mengatasi konflik yang sering terjadi dalam pembagian hak waris kepada anak angkat, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuat dokumen wasiat atau hibah. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial dan lembaga bantuan hukum, dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hal ini.

Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam untuk menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten dan adil. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang yang mengatur pengangkatan anak dan hukum waris, sehingga kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dapat diakui secara lebih jelas.

Penguatan peran lembaga peradilan juga menjadi langkah penting untuk menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan anak angkat. Pengadilan harus mampu memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti-bukti yang ada serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak angkat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak angkat menurut hukum di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai sistem hukum, seperti hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Proses pengangkatan anak secara legal

mensyaratkan prosedur ketat, termasuk penetapan pengadilan, guna menjamin perlindungan hak anak serta memberikan kepastian hukum. Dalam hal pewarisan, anak angkat menurut hukum perdata di Indonesia hanya dapat memperoleh hak waris melalui mekanisme wasiat atau hibah, dengan batasan tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Walaupun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan perbedaan penerapan antara sistem hukum yang berlaku, yang pada akhirnya menjadi hambatan dalam perlindungan hak-hak anak angkat sebagai ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muhammad. 2006. Hukum Perdata Indonesia: Buku 1 (Edisi Revisi). Sinar Grafika. Jakarta.
- Afandi, Ali. 2000. "Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Bina Aksara. Jakarta.
- Basyir Ahmad, Azhar., 1995. "Hukum Waris Islam". UII Press. Yogyakarta.
- Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. 1998. Marriage and Family Development (Sixth Edition). New York: Harper & Row.
- Hasan, Irwan. 2011. Pengangkatan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata. Kanisius Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003. Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, PT Citra AdityaBakti,Bandung.
- Hisyam Zaini. 2007. Strategi pembelajaran aktif. Insan Mandiri. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
- Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok.
- Kuwado Aditya, 2015, Pengaruh Hukum Keluarga terhadap Pembagian Warisan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meliala Djaja S. 2015. "Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata". Nuansa Aulia. Bandung.
- Mulyadi Iwan, 2017, Hukum Waris Indonesia: Prinsip dan Penerapannya dalam KUHPerdata dan Hukum Islam, PT. Refika Aditama, Bandung.
- 53
- Nugroho, Edi. 2005. Hukum Perdata di Indonesia: Suatu Tinjauan Umum. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Satrio, J. 2002. Hukum Waris. Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto,1999. Intisari Hukum Keluarga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, Soepomo. 2003. Hukum Keluarga dan Hukum Waris Indonesia.: Pradya Paramita. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zaenuddin Muhammad, 2006, Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Republik Indoensia
Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 1997 Dan Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak.